

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2015-2020****Reki F. Pura, Agnes L.Ch. P. Lopian, Krest D. Tolosang***Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis,**Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia**Email : Rekifridolen@gmail.com***ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa baik kinerja keuangan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio kemandirian, rasio keserasian (rasio belanja operasi dan rasio belanja modal) pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat. Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kinerja keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Halmahera Barat. Tahun 2015-2020 berdasarkan analisis rasio. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif data sekunder dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dari tahun 2015 sampai dengan 2020 teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Teknik dokumen. Dengan mengcopy file Laporan Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi masuk dalam kategori rendah, rasio ketergantungan berada di tingkat kategori sedang, rasio kemandirian keuangan daerah masih sangat kurang, rasio belanja operasi keuangan daerah mengalami porsi belanja yang cukup tinggi, rasio belanja modal keuangan daerah, mengalami penurunan dan porsi belanja modal cukup kecil.

Kata Kunci : Analisis Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan

ABSTRACT

This study aims to determine how well the financial performance of Regional Original Income. Based on the degree of decentralization ratio, dependency ratio, independence ratio, compatibility ratio (operational expenditure ratio and capital expenditure ratio) at the Regional Financial Management Agency of West Halmahera Regency. Based on the above background, the formulation of the problem in this study is: How is financial performance in financial management area in West Halmahera district. The year 2015-2020 is based on ratio analysis. This type of research is descriptive quantitative secondary data from the Regional Financial Management Agency from 2015 to 2020, the data collection technique used is the document technique. By copying the file of the Regional Revenue and Expenditure Budget Financial Report. Based on the test results show that the ratio of the degree of decentralization is in the low category, the dependency ratio is in the medium category level, the ratio of regional financial independence is still very lacking, the ratio of regional financial operations expenditure experiences a fairly high portion of expenditure. the ratio of regional financial capital expenditures decreased and the portion of capital expenditures was quite small.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Lembaga kekuasaan merupakan organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara, Lembaga pemerintah dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas. Nirlaba lembaga pemerintah mempunyai tujuan untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Tujuannya yang ingin di capai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif, misalnya peningkatan keamanan dan kenyamanan, mutu Pendidikan, mutu Kesehatan dan keamanan

Faktor keuangan penting dalam setiap kegiatan pemerintah karena hampir tidak ada kegiatan pemerintah yang tidak membutuhkan biaya. Makin besar jumlah uang yang tersedia, makin banyak peluang kemungkinana kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan demikia juga semakin baik pengelolaannya maka semakin berdayaguna pemakaian uang tersebut. Kabupaten Halmahera barat adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Maluku utara yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup pontensial. Pengembangan potensi wilayah Kabupaten serang tidak dapat dipisahkan sebagai bagian integral provinsi Maluku Utara sesuai dengan potensi wilayahnya serta sosial ekonomi sosial ekonomi masyarakat menekankan pengembangan pembangunan infrastruktur jalan, pertanian parawisata perdagangan dan jasa

Permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Kabupaten Halmahera Barat antara lain

(1) ketergantungan pemerintah daerah terhadap subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah provinsi. (2) rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibanding total penerimaan daerah (3) kurangnya usaha dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan menggali sumber- sumber pendapatan yang ada. (4) infisiensi pamarintah? daerah dalam menjalankan roda perekonomian, pembangunan dan pelayanan masyarat yang dituntut untuk dapat melaksanakan pemerintahan secara transparan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan agar tercipta pemerintah yang bersih, maka pemerintah daerah harus mampu menyelenggarakan pemerintahannya sehingga tercipta tata kelolah pemerintahan yang baik serta adanya evaluasi yang berkala atas capaian pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu, disini pemerintah daerah juga diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan didaerahnya.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan dalam pengelolaan keuangan Kabupaten Halmahera Barat. Tahun 2015-2020 berdasarkan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan rasio, kemandirian, rasio keserasian

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan secara sederhana dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan, perundang-undangan yang berlaku

Menurut Mamesah (1995 : 16) selain itu juga Menurut Munir (2004 : 94) “Keuangan daerah adalah keseluruhan tatanan perangkat kelembagaan dan kebijakan penganggaran

Pengelolaan Keuangan Daerah

Sartono (2011:50) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan maupun dapat diartikan sebagai pengelolaan dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investai atau pembelanjaan secara efisien. Hanafi (2012:2) mengemukakan bahwa pengelolaan keuangan adalah sebagai suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, staffing, pelaksanaan dan pengendalian fungsi-fungsi keuangan

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2005, Pengelola Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan unag termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan denga hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Rasio Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah perlu diperhatikan penguanya. Menurut Mohamad Mashsun (2013). Analisis laporan Keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan pengukurannya

Penelitian terdahulu

Mega Oktavia Ropa (2016) dalam penelitian ini berjudul Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten Minahasa selatan tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Minahasa selatan. Metode yang digunakan adalah deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan rasio kemandirian pengelolaan keuangan daerah masih rendah. Anim Rahmayati (2016) dalam penelitian ini berjudul Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013 tujuan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2011-2013. Metode yang digunakan adalah deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Sukoharjo masih belum optimal walaupun dalam pengelolaan pendapatan asli daerah sudah efektif tetapi tingkat tingkat kemandirian masih sangat rendah.

METODE PENELITIAN

Jenis Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dan kuantitatif karena data yang dikumpulkan dalam bentuk angka-angka dari laporan keuangan. Menurut Sugiyono (2017:8) penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada sifat positifme, digunakan meneliti pada populasi atau sampel tertentu pengumpulan data menggunakan *instrument* penelitian. analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah di tetapkan

Sumber Data

Sumber data yang akan menjadi analisis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Halmahera Barat yang berhubung dengan anggaran dan realisasi daerah.

Teknik pengumpulan data

Menurut sugiono (2014) Teknik pengumpulan data merupakan langka yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui Teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumen yaitu dengan mengcopy file laporan keuangan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015-2020

Defenisi Pengukuran dan variabel

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif dan deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagai mana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono 2007:147) untuk mengukur tingkat kinerja keuangan adapun rumusnya sebagai berikut:

1. Rasio Derajat Desentralisasi

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{PAD}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

2. Rasio Ketergantungan

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Trasfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

3. Rasio Kemandirian

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{PAD}{\text{Transfer Pusat} + \text{provinsi} + \text{pinjaman}} \times 100\%$$

4. Rasio Keserasian

$$A. \text{ Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanj operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$B. \text{ Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanj Modal}}{\text{Total Belanja Daera}} \times 100\%$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Hasil Penelitian**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari data tersebut nanatinya dapat memberikan gambaran atau informasi mengenai kinerja keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Halmahera Barat selama kurun waktu 6 tahun terakhir (2015-2020). Adapun hasil analisis rasio tersebut sebagai berikut:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

**Tabel 1 Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Halmahera Barat
Tahun 2015-2020**

Tahun PAD	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Derajat (Rp)	Desentralisasi (%)
2015	31.740.370.000	649.466.499.873	4,88
2016	34.315.853.000	906.926.189.000	3,78
2017	33.247.318.000	862.945.403.000	3,85
2018	35.990.500.000	981.293.889.763.	3,66
2019	77.504.580.404	1.012.637.382.452	7,65
2020	148.220.010.800	1.085.043.626.800	13,66
Rata-rata	361.018.632.204	3.145.711.270.480	11,47

Sumber : Data Diolah tahun 2021

Rasio Derajat Desentralisasi

Pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Barat termasuk Belum mampu menyelenggarakan desentralisasi karena nilai rata-rata yang masih dalam kategori sangat rendah (skala 0%-25%). Artinya pemerintah daerah kabupaten Halmagera Barat belum mampu menyelenggarakan desentralisasi dengan mengoptimalkan potensi daerah untuk menyelenggarakan pelayanan umum yang lebih baik sebab rata-rata rasio derajat desentralisasi hanya mencapai 11.47%

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Trasfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 2 Rasio Ketergantungan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015-2020

Tahun	Pendapatan transfer (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Ketergantungan (%)
2015	556.655.974.000	649.466.499.873	85,7
2016	719,894,508,000	906.926.189.000	79,38
2017	680,357,527,000	862.945.403.000	78,84
2018	796,943,074,000	981.293.889.763	81,21
2019	757,397,345,000	1.012.637.382.452	74,80
2020	746,074,435,000	1.085.043.626.800	68,76
Ratarata	4,230,330,000	5,498,310,000	1,26

Sumber : Data Diolah tahun 2021

Rasio ketergantungan

Dari hasil perhitungan rasio ketergantungan Pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Barat memiliki tingkat ketergantungan dalam kategori rendah (skala 0%-25%). Hal ini disebabkan masih rendahnya kontribusi dan retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan pendapatan Transfer. Artinya Kabupaten Halmahera Barat masih sangat bergantung kepada Pemerintah Pusat dengan rata-rata rasio ketergantungan sebesar 1,26%

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Transfer Pusat} + \text{provinsi} + \text{pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 3 Rasio Kemandirian Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015-2020

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian (%)
2015	31.740.370.00	61.050.115.873	0.51
2016	34.315.853.00	152.715.828.00	0.22
2017	33.247.318.00	149.340.558.00	0.22
2018	35.990..500.00	148.360.315.763	0.24
2019	77.504.580.404	177.735.457.048	0.43
2020	148.220.010.800	190.749.181.000	0.77
Rata-rata	361.018.632.204	1.429.402.455.684	25.25

Sumber : Data Diolah tahun 2021

Rasio kemandirian

Dari hasil perhitungan tingkat kemandirian. Kabupaten Halmahera Barat masih dalam kategori sangat rendah dengan pola hubungan instruktif untuk tahun 2015-2020 (skala 0%25%) dan pola hubungan Konsulatif jika dihitung dari Rata-rata rasio Kemandirian yang berarti Kabupaten Halmahera Barat belum mandiri sebab peranan Pemerintah Pusat masih lebih dominan. Sehingga Kabupaten Halmahera Barat tidak dapat melaksanakan otonomi daerah secara finansial Artinya pemerintah Kabupaten Halmahera belum mampu membiayai sendiri kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

$$A. \text{ Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanj operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4 Rasio Belanja Operasi Halmahera Barat Tahun 2015-2020

Tahun	Total Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja (Rp)	Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja (%)
2015	365.404.299.208	685.764.287.453	53.28
2016	484.732.900.000	901.206.058.000	53.78
2017	502.858.774.000	917.724.209.000	54.79
2018	526.999.454.595	1.135.177.801.595	46.42
2019	550.854.626.640	1.030.264.842.341	53.46
2020	596.118.795.903	1.048.043.626.800	56.87
Rata-rata	3.026.968.850.346	5.718.180.825.198	52.93

Sumber : Data Diolah tahun 2021.

$$B. \text{ Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanj Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 5 Rasio Belanja Modal Halmahera Barat Tahun 2015-2020

Tahun	Total Belanja Modal (Rp)	Total Belanja (Rp)	Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja (%)
2015	320.360.058.245	685.764.287.453	46.71
2016	416.473.185.000	901.206.058.000	46.21
2017	414.865.435.000	917.724.209.000	45.20
2018	626.178.347.000	1.135.177.801.595	55.16
2019	497.410.215.701	1.030.264.842.341	48.27
2020	451.924.830.897	1.048.043.626.800	43.12
Rata-rata	2.727.212.071.843	5.718.180.825.198	47.69

Sumber : Data Diolah tahun 2021

Rasio Belanja Modal

Porsi belanja modal Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat cukup rendah pada tahun 2015-2017 namun mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 55.16% kemudian Kembali menurun pada tahun 2019-2020 dengan rata-rata rasio belanja modal terhadap total belanja yaitu 47.69%

PENUTUP

Kesimpulan

Kinerja keuangan daerah pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2015-2020 berdasarkan rasio derajat desentralisasi masuk dalam kategori sangat rendah. Itu artinya pemerintah daerah kabupaten Halmahera Barat belum begitu baik dalam menyelenggarakan pelayanan umum, kemudian berdasarkan rasio ketergantungan keuangan daerah, mengalami tingkat ketergantungan di kategori sedang dari pemerintah pusat dalam pemberian dana transfer

Berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah, mengalami tingkat kemandirian yang kurang. Sebab peranan pemerintah pusat lebih dominan, sehingga pemerintah kabupaten Halmahera Barat belum mampu membiayai kebutuhan dan kegiatan pemerintahan daerahnya sendiri, kinerja keuangan daerah pemerintah kabupaten Halmahera Barat.

Kinerja keuangan daerah kabupaten Halmahera Barat tahun 2015-2020 berdasarkan rasio kesrasian yaitu rasio belanja operasi keuangan daerah, mengalami porsi belanja operasi yang cukup tinggi disebabkan oleh besarnya total belanja pegawai karena penambahan jumlah pegawai negeri sipil. Untuk rasio belanja modal keuangan daerah, porsi belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten Halmahera Barat cukup kecil dan dapat dikatakan pemerintah daerah kabupaten Halmahera Barat masih kurang memperhatikan pembangunan di daerahnya

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Barat diharapkan lebih lagi meningkatkan porsi belanja modal yang akan memberikan manfaat jangka Panjang untuk kabupaten Halmahera barat terutama pembangunan infrastruktur jalan bagi kecamatan dan desa yang belum mendapatkan akses jalan
2. Bagi praktisi Lembaga keuangan diharapkan berupaya lebih meningkatkan pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan memperluas sektor-sektor yang berpotensi menambah pendapatan asli daerah sehingga ketergantungan dari pemerintah pusat bisa semakin berkurang

DAFTAR PUSTAKA

- Anim, Rahmayati. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukharjo Tahun Anggaran 2011-2013* Jurnal EKA CIDA Vol. 1 No 1 Jurnal Berkala Efisiensi. Vol. 14 No. 2: 1-13 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta
- Abdul Halim (2001). *Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta: Selamba Empat*
- Abdul Halim, 2007. *Akutansi Sektor Publik: Akutansi Keuangan Daerah*. Selamba Empat Jakarta
- Abdul Halim. (2012) *Akuntansi Laporan Keuangan Daerah*. Selamba Empat : Jakarta.
- C.M.Poyoh., S.Murni., J.E.Tulung. *Analisis Kinerja Pendapatan Dan Belanja Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon*. Jurnal EMBA Vol.5 No.2 Juni 2017
- Fahmi, Irham. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan kedua. Bandung. Alfabeta
- Hanafi. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi 12. Bandung. Penerbit: Alfabeta
- Machmud, M, G. Kawang, dan W, Rompas. *2014 Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012*.
- Mega, O, Ropa , (2016). *Analisis Kinerja Keuangan pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan* Jurnal EMBA Vol. 4 No. 2 Hal 738-747
- M, Y, Melatunan, S, (2019) *Pinatik. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sorong*. Jurnal EMBA Vol. 7 No. 3 Hal. 4134-4143 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Munir, Dasril, Hendry Arys Djuanda dan Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2004 *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. YPAPI. Yogyakarta
- Mohamad Mashun. 2012. *Pengukur Kinerja Sektor Publik*. BPF, Yogyakarta
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, ANDI, Yogyakarta
- Rahardjo, A (2011). *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*. Cetakan Pertama Yogyakarta, Penerbit Graha Ilmu Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Saputra, (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Jembran Tahun 2010-2014*.
- Skripsi e-Journal* Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen Vol 4 Tahun 2016
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method)*. Alfabeta : Bandung
- Sartono. (2011). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Edisi Keempat. Yogyakarta. Penerbit: BPF.